

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
LEMBAR PERNYATAAN KARYA SENDIRI	iv
LEMBAR PEDOMAN PENGGUNAAN	v
KATA PENGANTAR	vi
RIWAYAT HIDUP.....	x
MOTO HIDUP	xi
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Kajian Pustaka.....	7
E. Langkah – langkah Penelitian	11
1. Heuristik	11
2. Kritik Sumber	17
3. Interpretasi	32
4. Historiografi.....	35
BAB II KONDISI POLITIK, SOSIAL, DAN EKONOMI INDONESIA PADA MASA PEMERINTAHAN SOEHARTO TAHUN 1998.....	38
A. Kondisi Politik : Dwifungsi ABRI, Pengawasan Media, dan Subversif	38
B. Kondisi Sosial : Asas Tunggal Pancasila dan Konflik Komunal	40
C. Kondisi Ekonomi : Krisis Moneter dan Perjanjian Hutang Dengan IMF	43
D. Proses Demokratisasi Indonesia pada masa Pemerintahan Soeharto tahun 1998.....	44
BAB III PERAN A.M FATWA DALAM PROSES REFORMASI KEADILAN DI INDONESIA PADA TAHUN 1998 – 2017	47
A. Riwayat Hidup A.M Fatwa.....	47

B. Riwayat Pendidikan A.M Fatwa.....	49
C. Kritik terhadap Orde Baru dalam Lembaran Putih Tanjung Priok dan Petisi 50	52
D. Karya Buku A.M Fatwa	60
1. <i>Dari Mimbar Ke Penjara, Suara Nurani Pencari Keadilan</i>	60
2. <i>Dari Cipininang Ke Senayan, Catatan Gerakan Reformasi dan Aktivitas Legislatif Hingga ST MPR 2002</i>	68
3. <i>Catatan Dari Senayan, Memori Akhir Tugas di Legislatif 1999 – 2004</i>	75
E. Peran A.M Fatwa dalam Proses Reformasi Keadilan di Indonesia Tahun	77
a. Kontribusi Pemikiran A.M Fatwa tentang:	
1. Gagasan Reformasi Keadilan Tahun (1998) - (2000).....	70
2. Konsep Keadilan Transisional Tahun (1998) - (2004)	74
3. Visi Negara Hukum (Perubahan UUD 1945 Tentang Pembagian Kekuasaan) Tahun 1999 - 2004.....	77
b. Aksi dan Gerakan	
1. Mobilisasi Dukungan Reformasi Tahun 1998	80
2. Negosiasi Politik : Penyelesaian Sengketa Aceh, Berdasarkan UU No. 18 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Aceh (Nanggore Aceh Darussalam)	87
c. Peran A.M Fatwa di Parlemen Tahun (1999 - 2017).....	90
1. Anggota DPR RI (1999 – 2004), Wakil Ketua MPR RI (2005-2009), Senator DPD RI (2009 – 2014), dan Ketua Dewan Kehormatan DPD RI (2014 – 2017).....	90
2. Pemegang Otoritas Persidangan RUU BUMN menjadi UU Tahun 2003	94
3. Penguatan Lembaga Hukum Lewat Komisi Yudisial (UU No. 4 Tahun 2004) Antara Tahun 2005 - 2009	96
d. Reformasi Sistem Peradilan	97
1. Pengawasan Lembaga Hukum dan Peradilan.....	97
2. Penguatan HAM Lewat RUU Pengadilan HAM (UU No. 26 Tahun 2000)	99
3. Amandemen UUD 1945 1999 - 2002	106

BAB IV KESIMPULAN	121
DAFTAR SUMBER	123
LAMPIRAN – LAMPIRAN	132

